

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan dalam perwujudan *good government governance* di Indonesia yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan, salah satunya dengan cara mengoptimalkan aparat pengawas pemerintah (Rendika, 2013:1).

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good government governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPR/DPRD. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik (Mardiasmo, 2009:189).

BPKP adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh dan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat serta bertujuan mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang berpotensi dari daerah tersebut. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah berperan penting dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan audit dilakukan oleh auditor. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka tata pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan fungsi audit, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu didukung oleh kinerja auditornya. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.

Suatu pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan disini bersifat membantu supaya sasaran yang telah ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini dapat menghindari terjadinya penyimpangan penyelenggaraan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran. Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari suatu tindakan untuk mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan

dalam suatu instansi yang akan diperiksa, dan membandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyetujui atau menolak hasil yang telah dibuat dan memberikan rekomendasi mengenai tindakan perbaikan (Sukriah *et al*, 2009: 2 dalam Wandita *et al*, 2014).

Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi dan objektivitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta objektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat kabupaten/kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawas fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota. Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2009:193). Sedangkan auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Mulyadi, 2010:29). Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah (Efendy, 2010:2).

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2014:67). Kinerja auditor internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pemeriksaan agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam perusahaan. Kinerja auditor yang baik juga akan meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam operasional perusahaan. Selain itu kinerja auditor internal akan menentukan kemajuan perusahaan karena dalam pemeriksaannya yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan memberikan rekomendasi.

Integritas auditor dapat berpengaruh terhadap kinerja audit. Menurut Sukriah *et al* (2009) dalam Parasayu dan Rohman (2014) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Dengan integritas yang tinggi, auditor

dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya (Pusdiklatwas BPKP, 2008) dalam Parasayu dan Rohman (2014). Auditor harus senantiasa menjaga integritas yang dimilikinya dalam melaksanakan pekerjaan audit. Sikap integritas auditor diperlukan karena berkaitan dengan kinerja audit yang dihasilkan. Dengan adanya integritas yang tinggi yang diiringi dengan meningkatnya kinerja audit, tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan dari publik terhadap pemerintahan. Karena dengan adanya kinerja audit yang baik akan mendukung kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan (Arianti *et al*, 2014).

Menurut Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif merupakan cara berpikir yang tidak berpihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari benturan kepentingan. Mabruri dan Winarna (2010) dalam Ariani dan Badera (2015) menyatakan semakin tinggi objektivitas auditor, semakin baik kualitas hasil pemeriksaan. Kualitas audit merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kinerja auditor internal. Sehingga, dengan tingginya sikap objektivitas auditor kualitas hasil pemeriksaan akan semakin baik, kualitas audit yang baik mencerminkan kinerja yang baik pula.

Menurut Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dalam Agoes (2012:L7), setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Auditor harus menjaga semua kerahasiaan informasi objek pemeriksaan yang didapat, walaupun dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor mungkin menghadapi tekanan dari pihak lainnya yang ingin mengetahui informasi tersebut. Dengan menjaga kerahasiaan, auditor dapat bekerja secara profesional sehingga akan mempengaruhi kualitas laporan hasil pemeriksaan yang menjadi salah satu penilaian terhadap kinerja auditor (Erina et al, 2012).

Internal auditor yang mampu mempertahankan kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya selama pemeriksaan mencerminkan bahwa auditor mampu melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip yang dianut. Sehingga auditor akan memperoleh kepercayaan publik dan mencerminkan auditor yang telah bersikap profesional. Pencapaian sikap profesional menunjukkan bahwa auditor dapat diandalkan dan dipercaya sehingga memiliki nilai kinerja yang baik. Sehingga internal auditor yang menjaga sikap kerahasiaannya dengan baik maka kinerjanya akan semakin baik.

Auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya (Rahayu dan Suhayati, 2010:2). Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan (Sukriah, 2009). Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman (Agoes, 2012:L6-L7).

Dalam meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Prihartini (2015) mengungkapkan bahwa kompetensi auditor merupakan kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, *intuitif*, dan objektif.

Fenomena pertama yang berkaitan dengan kinerja auditor inspektorat terjadi di DPRK Aceh Tenggara. Kasus Salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, Kepala Inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Disebutkan, tim sedang memfokuskan pada program kerja tahunan SKPK sampai agustus dan setelah itu mulai memeriksa dana desa. Menurutnya, tim auditor sudah turun ke Desa Lawe Loning Hakhapen pada 16 Agustus 2016 untuk melihat proyek pembangunan gudang Serba Guna dengan anggaran Rp. 299.202.800. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal.

(<http://aceh.tribunnews.com/2016/08/20/dewan-nilai-inspektorat-lemah,02>,

September 2016, 22:55 WIB).

Fenomena yang kedua, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014, berdasarkan tindak lanjut hasil audit yang dilakukan Inspektorat Kota Bandung, data awal dalam Rencana Strategis Inspektorat (sampai dengan tahun 2013) terdapat 228 rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang harus ditindaklanjuti dan belum mendapat status penyelesaian tindak lanjut “Selesai (S)”. Pada tahun 2014 persentase rekomendasi yang ditargetkan untuk mendapatkan status penyelesaian tindak lanjut “Selesai” adalah sebesar 7,56% (17 rekomendasi). Akan tetapi realisasinya hanya sebesar 6,14% (14 rekomendasi). Dengan demikian target dari penyelesaian tindak lanjut hasil audit tidak dapat tercapai. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas audit Inspektorat masih kurang baik (www.portal.bandung.go.id).

Fenomena ketiga, disebutkan bahwa peran Inspektorat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah layak untuk diambil alih pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Sebab, selama ini Inspektorat Daerah dinilai tidak mampu memberikan transparansi dari hasil fungsi pengawasan yang dilakukan kepada kinerja Pemerintah Daerah. Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa peran inspektorat daerah belum pernah terdengar fungsi jelasnya. Ada sejumlah asumsi yang mengatakan inspektorat daerah tidak berjalan sesuai perannya karena berada satu level dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dinas lain. Bahkan, pengamat dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Holid Nurjamil menduga, posisi inspektorat daerah yang mempunyai hirarki di bawah kepala daerah membuat fungsinya dianggap meragukan.

Inspektorat daerah memiliki beban moral ketika berada di bawah kepala daerah. Ketika pengawasan ada di bawah kepala daerah, pengawasan kinerja pemerintah daerah tidak akan pernah dianggap objektif (www.pikiran-rakyat.com, dikutip Senin, 26/03/2012).

Berdasarkan ketiga fenomena diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor inspektorat di Indonesia masih belum maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dapat terjadi karena auditor belum sepenuhnya menerapkan kode etik, yang dimana salah satu tujuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu integritas, objektivitas, dan kompetensi. Prinsip integritas diperlukan agar seorang auditor pemerintah dapat bersikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip objektivitas menunjukkan bahwa seorang auditor pemerintah harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses informasi juga tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain dalam mengambil keputusan. Prinsip kompetensi menunjukkan bahwa auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas.

Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan kinerja auditor inspektorat :

1. Dwi Anjani Prameswari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor. Sedangkan Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor.
2. Reni Yendrawati (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa Bahwa integritas, objektivitas, kemampuan menjaga rahasia dan kompetensi auditor akan berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah. Itu artinya dalam melaksanakan suatu pemeriksaan variabel ini wajib dimiliki oleh seorang auditor.
3. Komang Gunayanti Ariani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat. Dalam penelitiannya diketahui bahwa integritas berpengaruh positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. Hal ini bermakna bahwa semakin berintegritas auditor Inspektorat melakukan tugasnya maka semakin baik kinerjanya. Kedua, objektivitas berpengaruh positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. Hal ini bermakna bahwa semakin obyektif auditor Inspektorat melakukan tugasnya maka

semakin baik kinerjanya. Ketiga kerahasiaan berpengaruh positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. Hal ini bermakna bahwa semakin sikap kerahasiaan dilaksanakan auditor Inspektorat dalam tugasnya maka semakin baik kinerjanya. Keempat, kompetensi berpengaruh positif pada kinerja auditor Inspektorat Kota Denpasar. Hal ini bermakna bahwa semakin berkompoten auditor Inspektorat melakukan tugasnya maka semakin baik kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian penulis saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian yang berbeda, karena penulis berpendapat bahwa hasil dari satu tempat dengan tempat lainnya akan berbeda walaupun menggunakan variabel yang sama. Penulis ingin menguji Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“PENGARUH INTEGRITAS, OBJEKTIVITAS, KERAHASIAAN, DAN KOMPETENSI PADA KINERJA AUDITOR INSPEKTORAT (Penelitian Pada Inspektorat Kabupaten Bandung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana integritas auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana objektivitas auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana kerahasiaan auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Bagaimana kompetensi auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Bagaimana kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Berapa besar pengaruh integritas auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Berapa besar pengaruh objektivitas auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Berapa besar pengaruh kerahasiaan auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
9. Berapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pengaruh Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi terhadap kinerja auditor inspektorat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk mengetahui integritas auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui objektivitas auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui kerahasiaan auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui kompetensi auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh integritas auditor terhadap kinerja auditor Internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh objektivitas auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kerahasiaan auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.

9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai Pengaruh Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Internal di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Selain itu, sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Instansi dalam menilia Kualitas Audit Internal yang berkaitan dengan Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Auditor.

3. Bagi Pihak lain

Menambah wawasan dan pengetahuan akuntansi khususnya dalam mata kuliah *auditing* dengan memberikan bukti tentang Pengaruh Integritas,

Objektivitas, Kerahasiaan, dan Kompetensi Pada Kinerja Auditor Inspektorat. Memberikan informasi dan referensi kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian dan tertarik pada topik yang sejenis.

4. Bagi Instansi Pendidikan

Memperoleh informasi tentang kualitas yang dibutuhkan dunia kerja, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Independensi, Objektif, Pengetahuan dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualiatas Audit Internal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di Inspektorat Kabupaten Bandung yang beralamatkan Jl. Soreang KM 17, Kabupaten Bandung.